

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EKPPD)
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**






















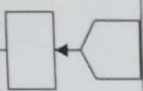

**BIRO PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Nomor SOP	014 / BiroPerem / I
Tanggal Pembuatan	Januari 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	
Disahkan Oleh	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nama SOP	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

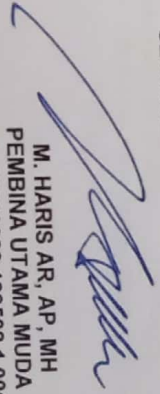
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANAAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN. 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan IPPD kepada Masyarakat. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah 6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan EKPPD 2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data dan informasi bahan laporan 	
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN	
SOP Alur surat masuk dan surat keluar SOP Pencarian Data dan Informasi SOP Pengarsipan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Format EKPPD 2. Laporan Realisasi Keuangan 3. Data dan Informasi Capaian Kinerja OPD Provinsi 4. Data dan Informasi asset PD 5. Perangkat Komputer 	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Evaluasi kinerja dimaksudkan untuk melihat pencapaian target kinerja program dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses Evaluasi Kinerja ini tidak akan berjalan lancar.		Rumusan rencana program dan kegiatan, target dan capaiannya untuk periode satu tahun anggaran	

**EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EKPPD)
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		Gubernur	Sekda	Ass Pem & Kesra	Biro Pemerintahan	Tim Daerah	Pemkab/ Kota	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Memerintahkan penyusunan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) berdasarkan PP Nomor 03 Tahun 2007.							Disposisi surat	1 hari	Disposisi surat
2.	Sekretaris Daerah meneruskan secara berjenjang kepada, Asisten Pemerintahan dan Kesra dan Kepala Biro Pemerintahan.							Disposisi surat	1 hari	Disposisi surat
3.	Kepala Biro Pemerintahan menindaklanjuti perintah tersebut dengan menyusun SK Tim Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), menyusun jadwal evaluasi dan menugaskan Tim Daerah untuk melaksanakan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) kabupaten dan kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung							Surat dan SK	3 hari	Surat dan SK
4.	Tim Daerah EPPD melakukan EKPPD kabupaten dan kota dalam wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung							Format penyusunan EKPPD	1 hari	Format penyusunan EKPPD
5.	Tim Daerah membuat Laporan Hasil Sementara EKPPD kabupaten/kota dan diserahkan ke Biro Pemerintahan untuk di rekap							Format penyusunan EKPPD	1 bulan	Laporan Awal PD
6.	Biro Pemerintahan melakukan proses finalisasi dan pengeditan rancangan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Provinsi Kepulauan Bangka Belitung							EKPPD sementara masing-masing PD	1 hari	EKPPD sementara masing-masing PD
7.	Tim Kegiatan melakukan validasi, verifikasi dan klarifikasi terkait data yang disampaikan oleh masing-masing PD berdasarkan data Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2017.							Data EKPPD	1 minggu	Data EKPPD
8.	Data hasil validasi, verifikasi dan klarifikasi PD yang telah lengkap dituangkan dalam rancangan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung							Dokumen EKPPD	1 hari	Dokumen EKPPD
9.								Draft Final Dokumen EKPPD	1 – 2 minggu	Draft Final Dokumen EKPPD
10.	Pengajuan secara berjenjang Kepala Biro Pemerintahan, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Sekretaris Daerah tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Gubernur untuk disetujui dan ditandatangani.							Dokumen EKPPD	1 hari	Paraf Koordinasi Persetujuan

10	Gudernus meneliti dan menandatangani Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (EKPPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk disampaikan kepada DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung									Dokumen Resmi EKPPD	1 hari	Dokumen Resmi EKPPD
11	Mengandakan dokumen EKPPD Provinsi Babel									Dokumen Resmi EKPPD	7 hari	Dokumen Resmi EKPPD
12	Mengarsipkan dan menyampaikan buku/ dokumen EKPPD Provinsi Babel ke DPRD									Dokumen Resmi EKPPD	1 hari	Dokumen Resmi EKPPD

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
SETDA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


M. HARIS AR, AP, MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760620 199502 1 001